

MEMAKNAI PRAKTIK AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM TRADISI KARNAVAL BERSIH DESA

Elieva Septia Putri¹, Lilik Purwanti²

^{1,2} Universitas Brawijaya

Email: elievaseptia@student.ub.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan makna tradisi karnaval bersih desa di Desa Landungsari, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam konteks akuntabilitas keuangan. Penelitian ini merupakan studi empiris dengan metode etnometodologi dalam paradigma interpretif, penelitian ini menggali pengalaman, praktik, serta pengetahuan lokal melalui observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara mendalam menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karnaval bersih desa bukan sekadar ritual budaya, namun mengandung nilai akuntabilitas yang dihadirkan melalui nguri-uri budaya dan transparansi melalui musyawarah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada tingkat desa terbentuk oleh nilai budaya, simbol, serta interaksi sosial, dan bukan semata oleh prosedur formal. Akuntabilitas diwujudkan melalui tercapainya kepuasan batin dan kebahagiaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi interpretif dengan menunjukkan bagaimana budaya lokal menjadi basis praktik akuntabilitas. Secara praktis, implikasinya mendorong pemerintah desa untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam mekanisme akuntabilitas yang lebih partisipatif, berakar pada identitas Nusantara.

Kata kunci: Karnaval Bersih Desa, Akuntabilitas, Etnometodologi

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki budaya yang begitu melimpah. Keberagaman ini yang membentuk identitas kolektif masyarakat dan menjadi kekuatan sosial yang diwarikan dari generasi ke generasi. Tradisi sebagai warisan yang diturunkan dari generasi sebelumnya hingga saat ini dengan penyesuaian kondisi tanpa pengurangan makna yang terkandung (Istikomah et al., 2024). Tradisi bersih desa merupakan kegiatan adat yang dilaksanakan setahun sekali dengan tujuan mendoakan keselamatan desa dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan (Ramadhani, 2022). Tradisi bersih desa merupakan warisan budaya lokal yang masih dipertahankan oleh Masyarakat Desa Landungsari, Kabupaten Malang sebagai penghormatan kepada leluhur. Pelaksanaan tradisi bersih desa di Desa Landungsari melibatkan berbagai ritual dan kegiatan sosial budaya, seperti pengajian, istighosah, kenduri, dan pawai budaya karnaval.

Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga menjadi media penguatan identitas sosial, kohesi komunitas, serta ekspresi

nilai-nilai gotong royong masyarakat Nusantara. Pada konteks masyarakat modern, tradisi bersih desa tetap bertahan sebagai ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai kelompok lintas usia, lintas latar belakang, dan lintas komunitas, sehingga menjadi representasi nyata dari harmoni sosial yang telah mengakar dalam budaya Jawa. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan bahwa budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan aset hidup (*living heritage*) yang terus direproduksi melalui partisipasi masyarakat. Tradisi bersih desa memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Meskipun kegiatan ini tidak diarahkan untuk menghasilkan keuntungan finansial, kontribusi masyarakat baik berupa tenaga, waktu, maupun sumber daya menunjukkan adanya komitmen kolektif untuk menjaga keberlangsungan budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memaknai tradisi ini sebagai investasi budaya, di mana nilai yang dihasilkan tidak terukur secara material, tetapi tercermin dalam kebahagiaan, kebanggaan identitas, dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, tradisi bersih desa menjadi contoh bagaimana budaya dapat berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat hubungan antarwarga sekaligus menciptakan makna yang melampaui nilai ekonomi konvensional.

Tradisi bersih desa memiliki makna mendalam bagi Masyarakat dari segi budaya dan sosialnya. Karnaval bersih desa menjadi ruang bagi Masyarakat untuk mengekspresikan identitas, simbol Sejarah, serta nilai-nilai yang dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat. Karnaval bersih desa setiap tahunnya tidak sekadar pertunjukan budaya, namun sarana memperkuat narasi kebersamaan dan gotong royong sebagai karakter budaya. Menariknya, pelaksanaan tradisi bersih desa tidak dapat dipisahkan dari praktik pengelolaan keuangan. Setiap kegiatan dalam rangkaian tradisi membutuhkan perencanaan, musyawarah, dan pengelolaan dana yang bersumber dari Masyarakat maupun dukungan desa. Akuntabilitas keuangan tidak hanya dipahami sebagai konsep administrative yang berbasis dokumen dan sistem formal, namun juga sebagai praktik sosial yang lahir dari budaya.

Penelitian ini menggali lebih dalam bagaimana cara pandang akuntabilitas keuangan dalam pelaksanaan karnaval bersih desa di Desa Landungsari. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merefleksikan makna karnaval bersih desa di Desa Landungsari dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan dengan spirit Nusantara. Penelitian sebelumnya membahas nilai kearifan lokal dan makna budaya bukan sebagai identitas sosial yang membentuk praktik akuntansi, penelitian yang mengaitkan tradisi budaya karnaval bersih

desa dengan akuntabilitas keuangan masih terbatas. Adapun nilai-nilai budaya seperti *nguri-uri* budaya, gotong royong, musyawarah dan transparansi sosial merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana berbasis Masyarakat.

Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan merefleksikan makna karnaval bersih desa di Desa Landungsari dengan menggali cara masyarakat memaknai tindakan, simbol, dan praktik keuangan yang hadir dalam sebuah tradisi. Melalui pendekatan etnometodologi, penelitian ini tidak hanya menelaah bagaimana proses pencatatan dan penggunaan dana dilakukan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai budaya, relasi sosial, dan kepercayaan komunal membentuk praktik akuntabilitas di tingkat masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas tidak dipahami sebagai mekanisme administratif semata, melainkan sebagai proses sosial yang berakar pada norma, spiritualitas, dan harmoni komunitas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur akuntansi dengan memperluas pemahaman mengenai akuntabilitas berbasis budaya (*culture-rooted accountability*), terutama dalam konteks masyarakat Nusantara yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong dan kebersamaan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam merancang tata kelola keuangan yang lebih partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sehingga akuntabilitas menjadi praktik yang tidak hanya memenuhi tuntutan formal, tetapi juga bermakna dan diterima oleh masyarakat. Lebih jauh, temuan penelitian ini dapat mendorong penguatan kebijakan pelestarian budaya sebagai aset sosial yang berdampak pada kesejahteraan dan kepuasan batin masyarakat.

KAJIAN TEORI DAN PERSPEKTIF PARADIGMA

Nilai Lokal dan Spirit Nusantara dalam Praktik Akuntansi

Nilai nusantara mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia dalam memahami relasi antara manusia, alam, leluhur, dan Tuhan. Nilai tersebut meliputi kolektivitas, harmoni, kesadaran spiritual, penghormatan tradisi, dan komunalitas dalam pengambilan keputusan. Pada konteks akuntansi, nilai Nusantara dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat mengelola keuangan, menyusun pertanggungjawaban, serta memaknai transparansi dan kepercayaan publik (Triyuwono, 2011).

Tradisi bersih desa sebagai ritual tahunan menampilkan praktik akuntansi yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, serta keterlibatan sosial sebagai mekanisme akuntabilitas. Keuangan tidak hanya dilihat sebagai angka, namun sebagai amanah yang

mengandung nilai moral dan spiritual. Penelitian ini menghubungkan akuntabilitas keuangan dengan realitas budaya lokal yang kaya akan makna.

Paradigma Interpretif

Paradigma interpretif memandang realitas sebagai sesuatu yang subjektif dibangun melalui pengalaman, nilai, dan pemaknaan individu. Penelitian interpretif bertujuan memahami fenomena sosial melalui perspektif subjek, bukan sekadar mengukur atau menguji hubungan variabel. Pada penelitian ini, paradigma interpretif memungkinkan peneliti menangkap makna terdalam dari tradisi karnaval bersih desa sebagai ruang sosial untuk membangun akuntabilitas keuangan berbasis nilai lokal. Paradigma ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat berinteraksi dengan subjek penelitian, sehingga pemahaman fenomena diperoleh melalui dialektika antara pengalaman peneliti dan perspektif informan.

Etnometodologi sebagai Pendekatan Memahami Praktik Sosial

Etnometodologi mempelajari bagaimana masyarakat secara sadar maupun tidak sadar menciptakan, mempertahankan, dan memberi makna pada tatanan sosial melalui praktik sehari-hari (Garfinkel, 1967). Pendekatan ini menekankan bahwa tindakan manusia termasuk praktik pengelolaan keuangan tidak dapat dipahami hanya melalui prosedur formal, tetapi melalui cara masyarakat menafsirkan simbol, interaksi, dan rutinitas mereka. Dalam konteks karnaval bersih desa, etnometodologi memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana warga memaknai iuran, musyawarah, transparansi, serta keputusan kolektif sebagai bagian dari praktik akuntabilitas yang muncul secara natural dari budaya lokal. Pendekatan ini membantu mengungkap bahwa akuntabilitas bukan sekadar laporan keuangan, tetapi proses sosial yang hidup melalui komunikasi, kepercayaan, dan kesadaran komunal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnometodologi untuk menggali, memahami, dan menafsirkan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam tradisi karnaval bersih desa di Desa Landungsari. Etnometodologi dicetuskan oleh Harold Garfinkel pada pertengahan abad 1950-an, etnometodologi menguatkan analisis berdasarkan hasil wawancara mendalam serta ekspresi yang muncul. Topik pembahasan

yang diangkat berasal dari fenomena Masyarakat (Ritzer, 2014). Adapun paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma interpretif. Burrell dan Morgan (1979) menjelaskan paradigma interpretif yaitu solipsism, fenomenologi, hermeneutic, ethnomethodology, dan interaksionisme simbolik. Sifat interpretif sebagai paradigma yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses sosial.

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa foto dan video, observasi secara langsung terhadap kegiatan karnaval bersih desa di Desa Landungsari. Peneliti melakukan wawancara mendalam triangulasi sumber dengan beberapa pelaku kegiatan, masyarakat, dan akademisi. Triangulasi sumber ini dilakukan untuk memperkaya dan memvalidasi interpretasi makna akuntabilitas budaya. Pertimbangan pemilihan informan dalam penelitian menggunakan pertimbangan berdasarkan kepakaran informan dalam hal subjek yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2010). Alasan utama pemilihan informan sebagai berikut:

Tabel 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Keterangan	Alasan Pemilihan
1	Ppg	49 th	Ketua pelaksana Karnaval Bersih Desa	<i>Key person</i> yang memiliki peran strategis dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan karnaval bersih desa.
2	Slm	53 th	Wakil Ketua pelaksana Karnaval Bersih Desa	<i>Key person</i> yang memiliki peran strategis berdasarkan
3	Ndo	24 th	Sekretaris Karnaval Bersih Desa	Memahami struktur organisasi dan administrasi organisasi
4	Ty	23 th	Ketua Karang Taruno RT	Mampu mendeskripsikan tradisi karnaval bersih desa
5	Nap	39 th	Bendahara Karnaval Bersih Desa	Memahami pengelolaan keuangan kegiatan
6	Mrs	57 th	Akademisi	Mampu mendeskripsikan bentuk nilai

				akuntansi pada tradisi karnaval bersih desa
7	Edg	57 th	Akademisi	Mampu mendeskripsikan bentuk nilai akuntansi pada tradisi karnaval bersih desa
8	Lmn	55 th	Masyarakat dan Pedagang	Penonton tradisi karnaval bersih desa

Wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi awal dengan perangkat Desa Landungsari. Informan kunci diberikan pertanyaan secara terbuka oleh peneliti. Peneliti menyaksikan langsung karnaval bersih desa di Desa Landungsari. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti terdiri dari indeksikalitas dan reflektivitas yang melibatkan dua tahapan (Kamayanti, 2020), berikut ini:

1. Analisis Indeksikalitas

Dilakukan untuk menemukan informasi bersifat simbolik seperti ungkapan, ekspresi, dan gerakan. Tahapan ini dilakukan berupa wawancara dengan informan yang sudah dipilih kemudian hasilnya diberikan makna tersirat dan tersurat.

2. Analisis Reflektivitas

Dilakukan untuk menggali makna lebih dalam dari informasi, peneliti memberikan arti dari temuan nilai-nilai hasil indeksikalitas. Nilai tersebut dikonfirmasi ke informan untuk memastikan kebenaran hasil dan nilai terkandung digali lebih lanjut akuntabilitasnya.

HASIL PENELITIAN

Tradisi Bersih Desa dan Evolusi Karnaval sebagai Ruang Ekspresi Budaya

Landung diartikan dengan Panjang dan sari adalah inti atau madu, sehingga diartikan dengan “*panjang penggalih, punjung rejekine.*” Desa Landungsari, Kabupaten Malang merupakan bagian dari Sejarah Malang, kala itu berupa hutan belantara kemudian datanglah tokoh yang melakukan babat alas hingga perkembangannya menjadi sebuah kampung.

Berdasarkan wawancara dengan informan, pembukaan alas pertama dimulai dari Dusun Bendungan yang dikenal dengan tanah subur melewati 2 sungai, kemudian sungai

dibendung untuk mengairi tanah pertanian di dusun tersebut dan sawah disekitarnya, berkat bendungan air tersebut maka dinamakan Dusun Bendungan. Kemudian meluas ke daerah utara disebut Rambaan, kemudian “*ngelandungno*” babat alas ke daerah Selatan yang disebut dengan Kelandungan. Tokoh yang membabat alas ini kemudian meninggal dan dimakamkan, sebagai tetenger makam dinamakan Makam Ki Ageng Mbah Doko Wono.

Sebagai upaya untuk menghindarkan dari bencana dan musibah (kolo) di wilayah Desa Landungsari, maka diadakan kegiatan Bersih Desa. Kegiatan sebagai bentuk tradisi masyarakat Landungsari yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk membersihkan diri dari sifat iri hati, dengki, sombong, congkak, tinggi hati, dan perbuatan yang melanggar hukum negara maupun hukum adat masyarakat. Lebih daripada itu, yaitu membersihkan lingkungan dari berbagai halangan agar tercipta suasana lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Bersih desa sebagai wujud rasa Syukur kepada Yang Maha Pencipta, dimulai dengan rangkaian istighotsah, kenduri, pengajian dan ditutup dengan pawai budaya atau karnaval yang mengambil tema “*Bersinergi dalam Budaya, Bermartabat dalam Berbangsa.*” Tema budaya yang dihadirkan ini menunjukkan adanya proses kreatif kolektif dalam menjaga kearifan lokal.

Bersih desa di Desal Landungsari merupakan tradisi yang berlangsung lintas generasi bertujuan memohon keselamatan dan mensyukuri limpahan rezeki. Tradisi ini berlangsung dua tahun sekali pada tingkatan desa dan satu tahun sekali pada tingkatan dusun pada rentang bulan Juli-Agustus. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai tradisi spiritual, namun juga media konsolidasi sosial Masyarakat. Karnaval budaya hadir sebagai bentuk modernisasi dan ekspresi kolektif dari tradisi bersih desa. Kegiatan ini awalnya hanya berisi pengajian, istighosah, dan kenduri untuk mendoakan leluhur. Seiring perkembangan waktu, antusiasme masyarakat terutama dari Dusun Klandungan mendorong hadirnya pawai budaya sebagai kegiatan utama. Karnaval menjadi simbol harmonisasi antara nilai tradisiomal dan ekspresi budaya kontemporer.

Keterlibatan Masyarakat dalam Prosesi Tradisi Bersih Desa

Pelaksanaan tradisi bersih desa dan karnaval melibatkan struktur sosial yang luas, dari perangkat desa, panitia ini, dan kontingen yang mewakili setiap wilayah. Terdapat 21 kontingen yang mewakili masing-masing wilayah dengan total 2115 peserta karnaval. Koordinasi dilaksanakan melalaui grup WhatsApp, rapat mingguan, dan rapat harian.

Perangkat desa berperan penting dalam pengajuan proses perizinan kepada Dinas Perhubungan, Koramil, Polsek, Polres dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penutupan jalan serta pengaturan keamanan. Adapun penyumbang terbesar dalam kegiatan ini adalah donator. Kolaborasi lintas elemen ini menggambarkan bahwa karnaval bukan hanya tanggung jawab panitia tetapi merupakan gerakan kolektif desa yang menggambarkan model *governance* berbasis komunitas. Karnaval bukan sekadar ritual budaya, namun event sosial yang menjadi ruang interaksi antar warga dan memperkuat identitas komunal. Respons masyarakat sangatlah antusias, namun banyaknya penonton menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan dan beberapa dampak lainnya seperti kerusakan pada beberapa atap rumah dan tumbuhan.

Dimensi Akuntabilitas dalam Perspektif Budaya

Dana yang diperoleh dianggap sebagai amanah, tidak ada sistem imbalan atau bagi hasil, sehingga seluruh panitia bekerja sebagai relawan dengan menerapkan nilai kejujuran dan tanggungjawab. Kegiatan yang berlangsung seperti istighosah dan kenduri menjadi simbol bahwa dana dan kegiatan ini tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga bernilai spiritual yang harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada leluhur dan Tuhan.

Paradigma Barat menjelaskan bahwa akuntansi merupakan bentuk praktik yang terdiri dari proses pencatatan, pengklarifikasian, peringkasan, pengolahan, dan penyajian informasi yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Pada tradisi karnaval bersih desa ini khususnya pada tahun 2025, pengelolaan keuangan bersifat sederhana dengan total anggaran sebesar Rp125.000.000 untuk pelaksanaan seluruh rangkaian, seluruh transaksi dicatat dalam format sederhana yaitu nomor, keterangan, debit dan kredit. Meninjau hal ini, proses pencatatan sudah memenuhi prinsip dasar akuntabilitas. Proses pemeriksaan keuangan dilakukan oleh panitia inti Bersama dengan perangkat desa. Adapun transparansi dilaksanakan berupa penyebaran informasi pada musyawarah ibu-ibu PKK atau rapat mingguan.

Berdasarkan konteks budaya, akuntabilitas memiliki ruang makna yang lebih luas, bukan hanya sekadar melaporkan angka namun menjaga harmoni sosial dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai komunitas (Gray, 2014). Pada tradisi karnaval bersih desa, akuntabilitas masyarakat terwujud melalui partisipasi kolektif dan penghormatan terhadap adat. Perspektif antropologi budaya menjelaskan bahwa karnaval merupakan simbol *collective effervescence* atau luapnya kebersamaan yang menciptakan rasa Bahagia komunal

(Durkheim, 1912). Karnaval tidak hanya dimaknai sebagai hiburan, namun sebagai asset sosial yang menghubungkan masyarakat, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan euforia kebahagiaan.

Aset budaya ini dapat dikategorikan sebagai intangible cultural assets yaitu asset non keuangan yang tidak dapat diukur secara nominal namun memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan keberlangsungan kehidupan sosial. Apabila budaya atau tradisi karnaval bersih desa hilang, maka hilang pula tanda kehidupan sosial. Meninjau dari sisi pengeluaran, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk karnava sering dipandang sekadar cost. Hakikatnya pendekatan cost benefit dalam kerangka sosial menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh jauh lebih besar, masyarakat memperoleh social return berupa kebahagiaan, kepuasan, rasa memiliki, kebanggaan budaya, dan keharmonisan sosial. Hal ini merupakan nilai yang tidak dapat dikuantifikasikan dengan parameter akuntansi konvensional. Bahkan apabila masyarakat merasa Lelah karena telah mempersiapkan setiap rangkaian, rasa lelah tersebut terbayar oleh kegembiraan kolektif yang menunjukkan adanya *emotional payoff* yang tinggi (Schechner, 2006).

Praktik *nguri-uri* budaya sebagai perwujudan keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika dan tanggung jawab intergenerasional masyarakat Nusantara. Pelestarian tradisi bukan hanya kegiatan seremonial namun bentuk akuntabilitas budaya yang berorientasi pada warisan nilai budaya. Keterlibatan langsung peneliti memberikan pemahaman otentik mengenai kebersamaan, dinamika gotong royong, dan praktik akuntabilitas non formal yang hadir dalam masyarakat. Pendekatan yang dilakukan peneliti menghasilkan temuan bahwa akuntabilitas tidak diwujudkan melalui laporan keuangan formal, namun melalui kepercayaan, keterbukaan informasi komunal, dan tanggung jawab moral antar masyarakat. Menariknya, nominal uang yang dikeluarkan oleh setiap kontingen karnaval berkisar antara Rp20-Rp50 juta, namun tidak menimbulkan keberatan atau resistensi, nominal uang tersebut diperoleh melalui hasil iuran RT/RW, karang taruna, kas RT/RW, ataupun donator pada setiap kontingennya. Masyarakat tidak merasakan adanya resistensi dikarenakan masyarakat tidak menilai pengeluaran tersebut sebagai biaya dalam akuntansi modern namun sebagai investasi budaya. Masyarakat memaknai laba bukan sebagai selisih antara pendapatan dan biaya, namun sebagai kepuasan dari penampilan kontingen, kebanggaan kolektif, dan kegembiraan yang dihasilkan untuk desa.

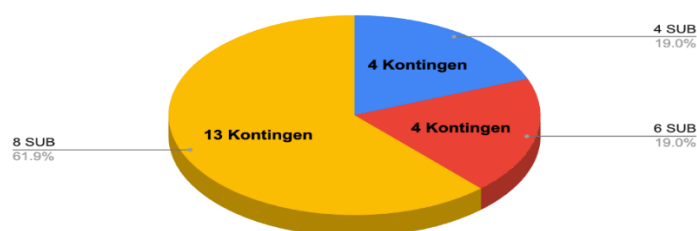
Berdasarkan kerangka ekonomi budaya, fenomena ini menggambarkan bahwa masyarakat menerapkan *Break Event Point* (BEP) sosial, bukan BEP finansial. Apabila

BEP konvensional menghitung titik impas antara biaya dan pendapatan, maka BEP sosial pada tradisi karnaval ini mengacu pada tercapainya kepuasan batin dan kebahagiaan, tercapainya kehormatan dan gengsi kontingen, terjaganya keharmonisan serta kebanggaan identitas desa, dan terpenuhinya kewajiban moral untuk turut serta dalam kegiatan desa. Masyarakat merasa telah “*impas*” bahkan ketika secara finansial mereka mengeluarkan banyak biaya karena nilai sosial budaya yang diterima dianggap jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa logika budaya dapat menggantikan logika ekonomi murni dalam pengambilan keputusan (Frey, 2019).

Terdapat dinamika menarik yaitu setiap kontingen karnaval memiliki rasa gengsi yang tinggi, sehingga berlomba mempersembahkan penampilan terbaik, kostum paling unik, property paling kreatif, dan koreografi yang paling meriah. Takjubnya, gengsi ini tidak berkembang menjadi kompetisi yang destruktif namun sebaliknya bahwa masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai guyub rukun yaitu semangat kebersamaan dan harmoni sosial yang menjadi inti kebudayaan masyarakat Jawa. Konsep ini selaras dengan pemikiran Koentjaraningrat (2009) tentang nilai dasar masyarakat Nusantara yang menekankan gotong royong, keselarasan, dan solidaritas.

Meskipun tradisi karnaval bersih desa memberikan euphoria dan kebanggaan kolektif, namun dalam pelaksanaannya muncul sejumlah kritik dari masyarakat. Beberapa kritikan tersebut adalah penggunaan *sound system (sound horeg)* berkekuatan tinggi, yang awalnya 6 SAP kemudian dirundingkan menjadi 8 SAP yang cukup besar untuk daerah pemukiman. Sound terlalu besar ini menimbulkan ketidaknyamanan, kebisingan, hingga keluhan kesehatan telinga. Ketiadaan asuransi atau perlindungan kesehatan terkait risiko paparan suara keras menuai kritik. Berikut ini merupakan diagram jumlah sound yang digunakan dalam prosesi tradisi karnaval bersih desa di Desa Landungsari pada tahun 2025:

JUMLAH SOUND (SUB) PER KONTINGEN



Gambar 1 Jumlah Sound (Sub) per Kontingen

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan 13 kontingen menggunakan 8 sub, 4 kontingen menggunakan 6 sub, dan 4 kontingen lainnya menggunakan 4 sub. Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas budaya tidaklah berhenti pada pelestarian tradisi, namun mencakup responsivitas terhadap kebutuhan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Menjadi perhatian bagi penyelenggara untuk menanggapi dampak kegiatan secara jelas dan tidak hanya mengandalkan legitimasi budaya. Kritik mengenai sound system ini menunjukkan dua hal penting, yaitu tradisi harus adaptif dan pelestarian budaya seharusnya tidak menjadikan abai terhadap keamanan masyarakat. Akuntabilitas budaya bersifat holistik, sehingga tidak hanya fokus pada partisipasi dan kebersamaan namun memiliki upaya untuk meminimalkan dampak negatif.

Kritik masyarakat terhadap penggunaan *sound system* yang berlebihan menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas dalam konteks budaya tidak hanya muncul dari struktur formal seperti panitia atau perangkat desa, tetapi juga dari kontrol sosial yang hidup di tengah komunitas. Partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat menggambarkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga kualitas tradisi agar tetap relevan dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Masyarakat berperan aktif sebagai pengawas sekaligus penjaga nilai, sehingga akuntabilitas budaya berjalan melalui dialog, musyawarah, serta tindakan saling mengingatkan. Hal ini mempertegas bahwa akuntabilitas bukan hanya proses pelaporan, melainkan proses sosial yang terbentuk dari hubungan interpersonal, kepercayaan, dan konsensus komunal.

Dinamika ini memperlihatkan bahwa konsep akuntabilitas budaya memiliki dimensi keberlanjutan sosial. Tradisi yang dijalankan bukan sekadar untuk melestarikan identitas, tetapi juga harus menjamin kenyamanan generasi masa kini serta memberikan contoh praktik budaya yang bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang. Adanya penyesuaian termasuk pengurangan tingkat kebisingan, pengaturan ulang tata panggung, hingga pengelolaan arus penonton penyelenggara menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab intergenerasional masyarakat Nusantara, yaitu menjaga warisan budaya tanpa mengabaikan kebutuhan serta kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kritik terhadap *sound system* menjadi bagian penting dari siklus pembelajaran kolektif yang memperkuat kualitas penyelenggaraan tradisi dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi karnaval bersih desa di Desa Landungsari merupakan praktik sosial yang tidak hanya bermanfaat sebagai ritual spiritual dan kebudayaan, namun menjadi ruang ekspresi dan konsolidasi sosial, serta memaknai tradisi berbasis nilai akuntabilitas. Akuntabilitas yang terwujud dalam kegiatan ini tidak serta merta seperti akuntansi modern yang berorientasi pada pelaporan formal, namun beroperasi melalui mekanisme kepercayaan, gotong royong, tanggungjawab, dan keterbukaan. Tradisi karnaval bersih desa tidak hanya mencerminkan praktik budaya, namun juga menampilkan model akuntabilitas kultural yang menjadikan penggunaan dana, keputusan kolektif, dan hasil kegiatan dipertanggungjawabkan melalui kepuasan masyarakat, pelestarian budaya, dan penguatan identitas komunal. Nilai-nilai ini hadir secara nyata melalui interaksi sosial bukan sekadar angka dalam laporan keuangan formal.

Konsep akuntabilitas budaya tercermin dari pemaknaan masyarakat terhadap biaya karnaval sebagai investasi sosial dan budaya. Pengeluaran kontingen yang besar tidak hanya sebagai biaya yang harus kembali berupa uang, namun sebagai sarana mencapai *social return* yaitu kepuasan, kebanggaan budaya, dan *euofaria* kolektif. Fenomena ini memperlihatkan berlakunya BEP sosial yaitu titik impas tidak dihitung berdasarkan uang namun berdasarkan nilai sosial dan emosional. Keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan keuangan historis. Implikasi penelitian ini memperkuat konsep bahwa akuntabilitas tidak hanya berorientasi pada pelaporan formal namun dapat berbetuk akuntabilitas budaya berbasis nilai, harmoni sosial, dan kepercayaan kolektif. Implikasi praktis penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perangkat desa dan panitia karnaval untuk mempertimbangkan pengelolaan risiko. Implikasi kebijakan yaitu mendorong pemerintah desa dan Lembaga kebudayaan untuk merancang kebijakan pelestarian budaya, adapun implikasi sosial dan budaya penelitian ini menegaskan pentingnya *nguri-uri* budaya sebagai akuntabilitas. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi longitudinal.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Kurniawan, Mimi, H. A., & Sofiatu Rohmah. (2024). Pesona: Commercial Platform Of Jember Fashion Carnival To Augment Economic Transformation Inclusivity And Diversity. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*.

- Afifah, D. N., & Irawan. (2021). Upaya Pelestarian Kesenian Bantengan di Wilayah Prigen Kabupaten Pasuruan (dalam perspektif tindakan sosial Max Weber). *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 547-557.
- Ana Sopanah, Adya Hermawati, Syamsul Bahri, Utami, R. N., & Sulistyan, R. B. (2024). Nilai Kearifan Lokal Kesenian Bantengan dalam Implementasi Akuntansi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(03), 804-816.
- Aprilian, E. W., Arif, & Poerwanti, S. D. (2025). Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar. *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*, 4(1), 13-20.
- Bayu Putra, C. G., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2020(11), 561-580.
- Broadbent, J., & Laughlin, R. (2009). *Performance management systems: A conceptual model*.
- Durkheim, E. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*.
- Ferry Karyada, I. P. (2024). Paradigma Nusantara dalam Masa Depan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 190-204.
- Frey, B. (2019). *Economics of Art and Culture*.
- Gray, R. (2014). *Social and Environmental Accounting and Accountability*.
- Izzah, A. N., Rizkiati Amalia, Rohman Al Falakh, M. F., & Rosi, R. I. (n.d.). Nilai-Nilai Solidaritas Sosial dalam Kelompok Bantengan Adi Putra Nuswantara. *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 6(1), 56-68.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*.
- Mihaela Bebeselea. (2023). Intercultural Aspect in The Accounting System in Romania and Republic of Bulgaria. *Journal of Intercultural Management and Ethics*, (2).
- Ratih Manuari, I. A., Kumalasari, P. D., Nyoman Sherina Devi, N. L., Ayu, I. G., Rastamiari, E. P., & Grace Hananingrum, N. L. P. (2024). Peran Tri Hita Karana dan Modal Intelektual Hijau dalam Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(3), 504-518.
- Risky Budianto, Latifah, S. a., Novrys Suhardianto, & Sri Iswati. (2023). *Budaya Akuntansi Indonesia: Praktik Akuntansi Level Keluarga, Masyarakat, dan Bisnis* (1st ed., Vol. 6). Jurnal Akademi Akuntansi.
- Rita Yuliana, Setiawan, A. R., & Robiatul Auliyah. (2020). Akuntansi Keluarga Sakinah Sebagai Manifestasi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 479-499.

Schechner, R. (2006). *Performance Studies: An Introduction*.

Sharon, S. S., & Selmita Paranoan. (2020). Refleksi Rumah Adat Ammatoa dalam Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 59-76.

Spradley, J. (1980). *Participant Observation*.

Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23-33.

Throsby, D. (2001). *Economics and Culture*.

UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*.